
**TRANSFORMASI KABUPATEN CILACAP MENUJU WILAYAH BERKARAKTER
NEGARA KELAUTAN****Endro Tri Susdarwono^{1*}, Faujan Aminullah²**¹Ilmu Komunikasi, Universitas Peradaban, Indonesia²Keamanan Maritim, Universitas Pertahanan, IndonesiaEmail: ¹susdarwonoendrotri@gmail.com, ²midas999saniscara@gmail.com***Penulis Korespondensi**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran terkait negara maritim. Bagaimana wilayah dalam negara maritim harus menerapkan instrumen-instrumen tertentu agar dapat dikatakan sebagai bagian dari negara maritim. Penelitian ini bertujuan memberikan deskripsi terkait transformasi Kabupaten Cilacap menjadi daerah yang berlandaskan karakter sebagai negara maritim. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan jenis data termasuk data sekunder dan teknik pengumpulan yang digunakan adalah library research. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif content analysis, yaitu penulis menganalisis data sekunder, kemudian menggunakan teori untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang penulis teliti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan enam sumber instrumen penting yang terkait transformasi menjadi daerah yang mempunyai karakter sebagai bagian dari negara maritim, Cilacap dengan potensi yang dimiliki dan pemanfaatan secara optimal sudah melakukan langkah menjadi daerah yang berkarakter maritim. Penelitian ini merekomendasikan untuk dapat dilakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan wilayah-wilayah yang sebenarnya sudah memiliki potensi atau sudah menerapkan instrumen tertentu sebagai bagian dari negara maritim.

Kata Kunci: *karakter, negara maritim, transformasi*

**TRANSFORMATION OF CILACAP REGENCY INTO A REGION BASED ON
CHARACTER AS A MARITIME COUNTRY****ABSTRACT**

This research was conducted to contribute ideas regarding maritime countries. How regions within a maritime state must implement certain instruments in order to be said to be part of a maritime state. This research aims to provide a description of the transformation of Cilacap district into a region based on its character as a maritime country. The type of research used is descriptive qualitative with the type of data including secondary data and the collection technique used is library research. The data analysis technique used is the qualitative content analysis data analysis technique, namely which is the author analyzes secondary data, then uses theory to explain a phenomenon or event that the author is researching. This research concludes that based on six important sources of instruments related to transformation into a region that has the character of being part of a maritime country, Cilacap, with its potential and optimal utilization, has taken steps to become a region that has a maritime character. This research recommends that more in-depth research can be carried out regarding areas that actually already have potential or have implemented certain instruments as part of a maritime country.

Keywords: *character, maritime state, transformation*

PENDAHULUAN

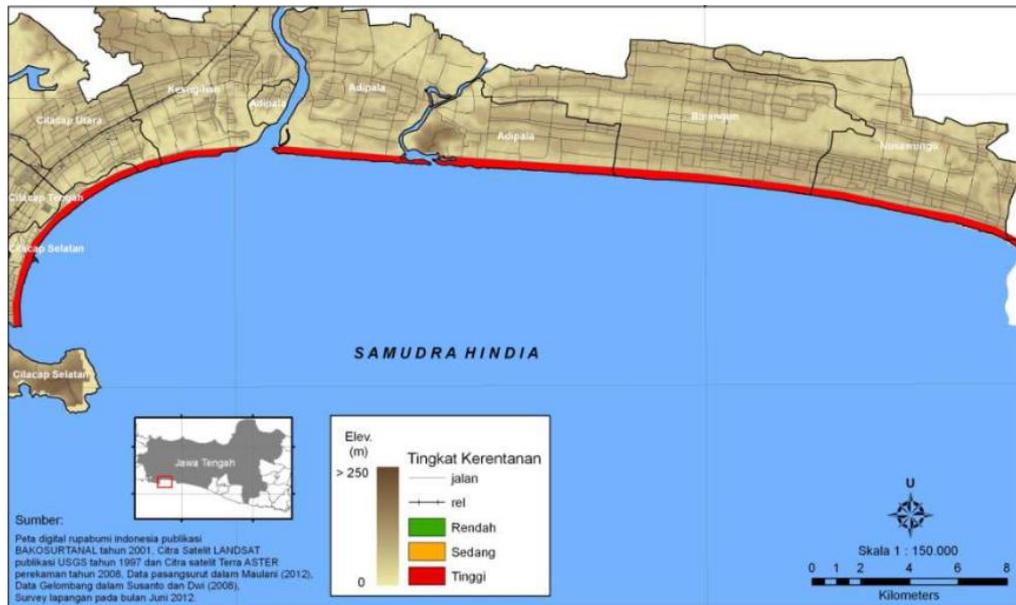
Keberadaan Indonesia di lingkup dunia sebagai negara kepulauan terbesar, bangsa Indonesia diajarkan tentang peran laut bagi kelangsungan hidup bangsa (Indiyani et al., 2014). Laut memiliki fungsi strategis untuk menunjang eksistensi bangsa, yakni sebagai media komunikasi, media pemersatu bangsa, media pembangunan, media sumber daya, media pertahanan negara, serta media pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Marsetio, 2014). Apabila tidak dapat dikendalikan, maka lautan yang luas tersebut dapat berpotensi permasalahan yang mengganggu dan mengancam kepentingan nasional. Sengketa perbatasan, eksploitasi sumber daya laut, eksplorasi pencarian keberadaan energi, gangguan keamanan, serta pelanggaran hukum (Hendrawan, 2020), merupakan permasalahan yang harus diantisipasi. Negara harus membangun kekuatan laut (*sea power*) secara menyeluruh, sistematis dan terstruktur (Marsetio, 2014).

Nusantara sebagai cikal bakal Indonesia sebenarnya sudah membuktikan kekuatan laut yang menguasai jalur-jalur perdagangan dan dominasi terhadap penguasaan negara (Nugraha & Sudirman, 2016). *Jalesveva Jayamahe* yang berarti "justru di laut kita jaya", merupakan slogan penyemangat angkatan laut, tentu harus diwujudkan. Terdapat pertanyaan mendasar yang semestinya dapat terjawab secara tegas, yakni apa yang hendak diwujudkan (*ends*), dengan apa mewujudkan (*means*) serta bagaimana mewujudkannya (*ways*) (Arif & Yanto, 2020).

Tradisi bangsa bahari, yang lebih condong pada kesadaran terhadap lingkungan geografis dan sumber daya yang dimiliki sebagai negara kepulauan, ternyata berbeda dengan tradisi bangsa maritim, yang lebih condong pada kesadaran memanfaatkan laut sebagai sumber kehidupan. Laut dan sumber dayanya, bukan hanya dianggap sebagai modal kapital yang dapat dieksploitasi saja, tetapi mampu menjelma menjadi *habitus* yang mencakup nilai sosial yang dihayati dan budaya yang dipegang teguh (Marsetio, 2014). Kemampuan suatu bangsa merajut tradisi bahari maupun maritim antara masa lalu dan masa kini akan menentukan masa depan bangsa itu dalam domain maritim yang penuh kompetisi antar bangsa (Haras, 2017). Bangsa Indonesia tidak saja harus memiliki kapital sebagai bangsa bahari tetapi harus juga memiliki *habitus* sebagai bangsa maritim. Pengalaman bangsa lain menunjukkan bahwa upaya awal mereka membangun karakter bahari dan maritim adalah melalui dunia pendidikan yang pada jangka menengah dan panjang akan berkontribusi terhadap kemajuan di bidang ekonomi (Bueger & Edmunds, 2017). Kemakmuran bangsa akan lebih meningkat seiring dengan melekatnya karakter maritim pada karakter pemerintah (Bueger, 2015).

Penguasaan laut (*sea power*) pada hakikatnya adalah suatu kemampuan untuk menguasai wilayah lautan, sekaligus untuk pencegahan terhadap pihak lawan untuk pemanfaatan wilayah tersebut bagi kepentingannya. Ini diwujudkan melalui pemanfaatan dan penguasaan terhadap laut (*sea control*) serta pencegahan terhadap lawan dalam menggunakannya (*sea denial*) (Hermawan & Sutanto, 2022). Pemenuhan terhadap *Sea power* tidak cukup hanya dengan armada kapal perang saja, melainkan ditopang dengan

kekuatan lainnya, seperti kekuatan penegakan hukum, kekuatan ekonomi, kekuatan industri, kekuatan ilmu pengetahuan, serta kekuatan jasa di bidang kemaritiman (Antony, 2022; Till, 2018).



Gambar 1: Peta Bentangan Pesisir Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten dengan wilayah yang strategis, seperti pada Gambar 1. Dengan posisi wilayah yang menghadap Samudera Hindia, Cilacap memiliki kekayaan alam yang melimpah, baik daratan maupun lautan. Cilacap juga memiliki pelabuhan untuk bersandarnya kapal besar dan potensi pariwisata laut. Kondisi ini menjadikan Cilacap berpotensi melakukan transformasi menjadi daerah yang berkarakter *maritime country*. Dalam aspek perekonomian, Kabupaten Cilacap menjadi *pioneer* pengembangan ekonomi di daerah (peringkat ke-2 se Jawa Tengah). Berbagai industri besar dibangun di Cilacap, seperti Pertamina, PLTU, PLBC (*Cilacap Blue Sky Project*), RFCC (*Residual Fuel Catalytic Cracking*), serta industri lainnya (Putri, 2019). Cilacap mampu menghasilkan PDRB sebesar Rp 110.928.209,01 (Tahun 2018). Dalam perekonomian mikro, banyak masyarakat Cilacap yang memiliki profesi sebagai nelayan. Hasil tangkapan laut setiap harinya sangat bermanfaat untuk konsumsi masyarakat. Potensi pariwisata di Cilacap dapat ditemukan di beberapa pantai, seperti Pantai Nusakambangan, Pantai Sodong, Pantai Widarapayung, dan Pantai Teluk Penyu.

Berdasarkan penelitian terdahulu, diketahui bahwa Cilacap memiliki potensi unggulan di sektor kemaritiman (Kristian Cahyandi, 2018). Potensi laut dan ikan merupakan pintu bagi pengembangan perekonomian daerah (Kristian Cahyandi, 2017). Manajemen Potensi Maritim yang dikelola oleh Pangkalan Angkatan Laut Cilacap dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Adriyanto et.al, 2017), meskipun masih terdapat kelemahan dalam kerjasama dan pengawasan penanganan imigran ilegal.

Sebagaimana disampaikan oleh A.T Mahan dan Corbett, terdapat enam sumber instrumen penting yang seyogyanya diaplikasikan suatu negara untuk mencapai *command of the sea through naval superiority*, yaitu kedudukan geografi, bentuk tanah dan pantai, luas wilayah, jumlah penduduk yang turun ke laut, karakter nasional (penduduk) dan karakter pemerintah termasuk lembaga-lembaga nasional (Porlida & Kafaridis, 2016). Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana Kabupaten Cilacap bertransformasi menjadi daerah berkarakter negara maritim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian literatur menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data sekunder berupa artikel yang sejenis sebanyak 11 artikel, rentang publikasi artikel yang digunakan dalam penelitian tahun 2015-2022 dengan cara pemetaan sesuai dengan tema potensi maritim dan karakteristik negara maritim. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan sebagai teknik pengumpulan datanya. Metode yang digunakan melalui pengumpulan materi yang terkait dalam buku ilmiah yang terkait dengan permasalahan, selain itu meliputi juga artikel dalam internet sebagai pendukung. Penelitian ini menerapkan teknik analisis data kualitatif melalui *content analysis* sebagai teknik analisis datanya. *Content analysis* yang dimaksud bahwa penulis melakukan penganalisisan terhadap data sekunder yang ada, setelah itu dengan mendasarkan pada pijakan teori, penulis menjelaskan terhadap fenomena yang diteliti penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Geografis

Kondisi geografis maritim sangat bergantung dengan fasilitas pelabuhan, sebagai urat nadi *connectivity*. Pelabuhan tidak saja sebagai simpul perdagangan laut tetapi juga pangkalan-pangkalan bagi pencarian dan pengembangan sumber energi baru dan sumber pangan baru. Pelabuhan di masa mendatang dapat dibangun di lepas pantai atau di tengah lautan dengan konsep *sea basing* sesuai konfigurasi kepulauan.

Wilayah Cilacap bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Perairan Cilacap dengan bentangan garis pantai sepanjang 190 km, diduga terdapat potensi energi pasang surut yang tinggi, karena adanya pengaruh gaya tarik bulan dan matahari. Dengan nilai muka air pasang tertinggi sebesar 2,3 m dan surut terendah sebesar 0,05 m, diperoleh luasan pantai 1,1 km² dan energi pasang surut sebesar 61.161 kWh/km per tahun (Maulani et al., 2012).

Potensi laut yang ada di Kabupaten Cilacap terbilang besar, mencapai 865.100 ton per tahu, dengan rincian seperti pada Tabel 1.

Tabel 1: Potensi Perikanan Laut di Kabupaten Cilacap

No	Jenis	Ikan	Potensi
1	Pelagis	layaran, kakap, layur, tuna, meka, tongkol, tengiri	275.600
2	Pelagis Kecil	teri, tiga waja, jabrik, gerok, gogokan dan dawah	428.700
3	Demarsal	cucut, pari, bawal, tuna, bokor	134.100
4	Udang	dogol, jerbung, krosok, lobster, rebon, dan tiger	12.500
5	Cumi-cumi		3.200
Jumlah			865.100

Sumber: (Simanjuntak et.al, 2019)

Letak geografis Cilacap langsung berhadapan dengan Samudera Hindia membuat sumber daya perikanan tuna memiliki masa depan yang cerah. Produksi ikan tuna Cilacap sebesar 26 % dari seluruh jumlah produksi ikan di Cilacap atau 1225 ton per tahun. Ikan tuna di Cilacap cukup potensial dan pertumbuhannya mengalami perkembangan. Produksi ikan tuna dari tahun 1999 sampai 2009 mengalami kenaikan rata-rata 10 % (PPS Cilacap, 2008). Perlu diingat, bahwa Samudera Hindia memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi yaitu sebesar 6.409 juta ton per tahun dengan potensi yang dimanfaatkan sebesar 5.127 juta ton per tahun. Samudera Hindia memiliki potensi sumber daya ikan Pelagis besar sebesar 386,260 ton per tahun dengan produksi sebesar 188,280 ton per tahun dan tingkat pemanfaatan sebesar 48,74%. Potensi lestari sumber daya ikan tuna di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah adalah 1439,86 ton/tahun dan upaya optimumnya adalah 155 unit/tahun. Adapun tingkat pemanfaatan sumber daya ikan tuna di perairan Cilacap sebesar 85,12 % (Sibagariang et al., 2011).

Konfigurasi Wilayah

Potensi alam berkaitan dengan aktivitas perdagangan pelabuhan. Hasil alam yang bernilai ekonomi seperti ikan maupun udang, keluar masuk ekspor melalui pelabuhan. Pelabuhan perikanan yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, berpotensi langsung dengan aktivitas pelabuhan. Produk (komoditi) perdagangan laut seperti perikanan, berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan aktivitas sosial masyarakat (Taufiqurrahman, 2012). Pelabuhan berfungsi sebagai pusat dan penghubung aktivitas perdagangan dan aktivitas perikanan.

Aktivitas sosial nelayan berupa pola kehidupan sosial para nelayan yang didasari pada kebutuhan pembentukan erat antara hubungan individu dengan individu lainnya (Melamba, 2011). Desa nelayan memiliki kondisi sosial yang erat dengan pelayaran dan perikanan. Nelayan menjual hasil tangkapan kepada penjual dipasar ikan dengan mengelilingi perkampungan (Zuhdi, 2012).

Konfigurasi wilayah mencerminkan aksesibilitas suatu wilayah terhadap wilayah yang lain. Konfigurasi ini dapat berupa sistem pertahanan, sistem transportasi maupun sistem komunikasi. Wilayah Cilacap bukan hanya berkenaan dengan kepentingan daerah tingkat

Jawa Tengah maupun Jawa secara utuh, melainkan berkaitan dengan kepentingan nasional yang berhadapan dengan negara lain. Dengan demikian, maka penataan dan pengelolaan yang lebih intensif harus dilakukan tidak saja dengan *first track diplomacy* tetapi juga dapat mengandalkan *second track diplomacy*.

Luas Wilayah

Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah, dengan luasan wilayah 2.124,47 km² (termasuk Pulau Nusakambangan). Peta secara keseluruhan Kabupaten Cilacap seperti pada Gambar 2.



Gambar 2: Peta Wilayah Kabupaten Cilacap

Luas wilayah Kabupaten Cilacap mencapai 6,477% dari keseluruhan luasan wilayah Propinsi Jawa Tengah, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Batas wilayah utara : Kabupaten Banyumas
- Batas wilayah selatan : Samudra Indonesia
- Batas wilayah barat : Provinsi Jawa Barat
- Batas wilayah timur : Kabupaten Kebumen

Kabupaten Cilacap, secara geografis terletak diantara 108^o 4' 30" - 109^o 30' 30" garis bujur timur dan 7^o 30' - 7^o 45' 20" garis lintang selatan. Bagian utara Kabupaten ini berbentuk perbukitan dengan puncaknya Gunung Pojoktiga yang tingginya mencapai 1.347 meter. Bagian selatannya berupa dataran rendah yang dipenuhi kawasan perhutanan dan lautan yang luas.

Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Cilacap berjumlah 1,96 juta (BPS 2022) dengan persentase pertumbuhan sebesar 0,01 persen dan angka rasio jenis kelamin 102. Pada sektor perikanan, penyerapan tenaga kerjanya terbilang fluktuatif, meningkat dari tahun 2017-2021. Dengan demikian, sektor perikanan merupakan salah satu sector yang progresif dan berdaya saing di Kabupaten Cilacap (Putri, 2019), meskipun masih lambat jika dibanding dengan Jawa Tengah. Peningkatan ini didukung dengan beberapa upaya pemenuhan terhadap sarana dan prasarana di sektor perikanan di Kabupaten Cilacap, seperti 11 Tempat Pelelangan Ikan (TPI), 7 unit dermaga, 2 unit depot BBM, 5 unit pabrik es, 3 unit *cold stroge*, dan 1 unit pelabuhan ekspor-impor. Jumlah nelayan di Kabupaten Cilacap adalah 33.000 orang, dengan alat penangkapan 107.523 unit dan armada penangkapan 4.538 buah, dengan komposisi armada seperti pada Tabel 2.

Tabel 2: Armada penangkapan ikan di Kabupaten Cilacap

No	Armada	Jumlah
1	Perahu tanpa motor	649
2	Perahu motor tempel	1.139
3	Kapal motor	2.639
4	Kapal long line	115

Sumber: Kabupaten Cilacap 2021

Berbagai sarana pendukung perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Cilacap tersebut, ternyata belum mampu mencapai zona ZEEI. Dengan demikian terdapat peluang besar terhadap investasi perikanan di Kabupaten Cilacap dalam skala yang lebih besar, seperti investasi pada armada long line dan docking kapal 100GT, yang mampu mencapai zona ZEEI.

Selain perikanan laut, Kabupaten Cilacap juga memiliki potensi perikanan darat. Dengan 9.000 orang nelayanan perairan umum, telah menggarap tambak air payau 12.000 ha, budidaya ikan air tawar 2.500 ha, budidaya rumput laut seluas 13.050 Ha, dan budidaya ikan kerapu seluas 891 Ha.

Karakter Bangsa

Masyarakat di Cilacap sangat menyadari bahwa hidup kedepan akan sangat bergantung pada lautan, sehingga banyak upaya yang dilakukan untuk menggali potensi yang ada terkait lautan dan mengupayakan pemanfaatan yang sebaik-baiknya. Masyarakat pesisir merupakan kelompok orang yang tinggal dan menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir (Pratomo, 2014). Bukan hanya nelayan dan pedagang ikan saja, melainkan banyak peluang usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat pesisir, seperti usaha pariwisata, jasa transportasi, serta usaha lainnya yang memanfaatkan sumber daya non hayati di laut dan pesisir.

Memang, nelayan dan pedagang ikan merupakan kelompok masyarakat yang mendominasi pemukiman di wilayah pesisir. Sebagian besar dari mereka adalah nelayan skala kecil, yang hanya cukup untuk menghidupi keluarga sendiri. Beberapa nelayan yang lain berstatus sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ikut bekerja di suatu usaha penangkapan ikan. Kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab rendahnya SDM di wilayah pesisir. Oleh karena itu perlu upaya peningkatan kemampuan SDM pesisir untuk meningkatkan volume dan atau nilai tambah produk-produk maritim.

Karakter Pemerintah

Karakter pemerintah menjelaskan mengenai sikap pemerintah terhadap pembangunan maritim. Apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memperhatikan atau bercorak pembangunan maritim atau tidak?. Sudah semestinya Indonesia memiliki pembangunan yang bercorak maritim, karena Indonesia adalah negara kepulauan dan sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Kabupaten Cilacap merupakan salah satu wilayah yang berhadapan langsung dengan samudera hindia, sehingga layak kalau memiliki rencana pembangunan yang bercorak maritim.

Pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan hidup menjadi dasar kebijakan yang diterapkan Kabupaten Cilacap dalam pembangunan bidang perikanan. Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam hal peningkatan kualitas hidup pengolah ikan dan nelayan, selain itu upaya dalam peningkatan serapan tenaga kerja, membuka peluang usaha, upaya peningkatan pendapatan meliputi nelayan, petambak, serta masyarakat yang berada di sekitar pesisir lainnya, mengatasi kemiskinan, peningkatan terhadap konsumsi ikan, upaya pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, serta upaya peningkatan terhadap ketahanan pangan. Arah dari kebijakan tersebut menekankan pada pengendalian perikanan tangkap tanpa penangkapan ikan yang berlebihan, peningkatan mutu dalam hal pengembangan budidaya perikanan, serta pengembangan produk perikanan.

Di sisi lain kebijakan operasional dalam hal pembangunan kelautan dan perikanan meliputi upaya dalam peningkatan baik sumber daya manusia maupun kelembagaannya, dorongan dalam hal melakukan optimalisasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang ada, upaya peningkatan produktivitas dengan tetap adanya perhatian terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup secara baik. Pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan dalam bidang perikanan di Kabupaten Cilacap sangat diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat terutama petani dan nelayan, mampu mengurangi kemiskinan, serta kemampuan dalam menyerap tenaga kerja.

Cara yang diterapkan dalam rangka mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Cilacap dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang terkait dengan sumber daya kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas, permodalan, *empowerment* masyarakat, modernisasi dalam sarana dan prasarana, serta pemasaran hasil perikanan. Ini sejalan dengan implementasi kebijakan untuk pembangunan komoditas ataupun produk-produk unggulan perikanan, perbaikan dalam upaya mengelola sumber daya ikan serta

perikanan dengan kelestarian ekosistem perairan baik darat maupun pesisir. Disamping itu *output* kebijakan yang diharapkan adalah mampu memberikan peningkatan lapangan kerja, peningkatan produktivitas serta kemampuan dalam melakukan ekspor hasil-hasil kelautan dan perikanan.

Istilah Minapolitan, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.12/MEN/2010 tentang Minapolitan, merupakan konsep pembangunan ekonomi di bidang kelautan dan perikanan berbasis kawasan dengan prinsip keterpaduan, mutu, percepatan, dan efisiensi. Konsep minapolitan mencakup sektor produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya, dengan tujuan untuk:

- 1) Peningkatan hasil kelautan dan perikanan melalui produksi, produktivitas dan mutu;
- 2) Peningkatan sumber daya pembudi daya ikan, pengolah ikan, serta nelayan dengan prinsip adil dan merata; dan
- 3) Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi daerah melalui Kawasan minapolitan.

Pemerintah Pusat dalam rangka menciptakan Kawasan Minapolitan sudah menentukan 16 keberadaan pelabuhan perikanan yang ditentukan sebagai *pilot project* Kawasan Minapolitan. 16 pelabuhan perikanan yang ditentukan meliputi diantaranya: Tanjung Pandan, Bitung, Pelabuhan Ratu, Jakarta, serta Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap. Dalam pengembangan Kawasan Minapolitan, Pelabuhan Perikanan Cilacap terpilih menjadi salah satu pelabuhan dengan kriteria yang menitikberatkan pada keberadaan sarana dan prasarana sesuai persyaratan yang ditentukan. Kriteria yang menjadi dasar meliputi kemampuan pelabuhan didalam menampung sampai 250 kapal, selain itu pelabuhan alam Cilacap sudah memiliki 7 unit dermaga, keberadaan depo BBM, Tempat Pelelangan Ikan hingga sejumlah 11 TPI, adanya 5 unit pabrik es dengan kapasitas sebesar 236 ton serta cold storage sebanyak 3 unit dengan kapasitas mencapai 75 ton. Kondisi pelabuhan di Cilacap dimana termasuk ke dalam pelabuhan alam dan perairan yang memiliki kedalaman sesuai ketentuan internasional di sekitar dermaga menjadi pendukung dalam sarana dan infrastruktur. Ketentuan terkait pelabuhan menyebutkan bahwa kategori pelabuhan alam sangat baik terutama bagi jenis kapal dan perahu besar untuk berlabuh. Terkait dengan keberadaan potensi perikanan darat di Kabupaten Cilacap, di tahun 2002 saja Dinas Perikanan dan Kelautan mendata bahwa terdapat perairan umum seluas 598,6 Ha dan minapadi seluas 60,72 Ha, dengan tingkat pemanfaat 30-40 persen, perikanan kolam dengan luas 573,96 Ha serta perikanan tambak sekitar 819,70 Ha.

SIMPULAN

Kabupaten Cilacap memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi daerah yang berkarakter negara maritim. Berdasarkan kondisi geografis, wilayah Kabupaten Cilacap berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Dengan luasan wilayah 2.124,47 km² (termasuk Pulau Nusakambangan), Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di

Jawa Tengah. Bentangan garis pantai sepanjang 190 km menjadi potensi Cilacap untuk mengembangkan potensi wilayah pesisir. Konfigurasi wilayah laut Kabupaten Cilacap, baik berupa sistem pertahanan, sistem transportasi dan sistem komunikasi, bukan hanya berkenaan dengan kepentingan daerah lokal saja, melainkan berkaitan dengan kepentingan nasional yang berhadapan dengan negara lain. Pada sektor perikanan, penyerapan tenaga kerjanya terbilang fluktuatif, meningkat setiap tahun. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang progresif dan berdaya saing di Kabupaten Cilacap.

Karakter bangsa diwujudkan melalui masyarakat Cilacap yang menyadari bahwa hidup ke depan akan sangat bergantung pada lautan, sehingga banyak upaya yang dilakukan untuk menggali potensi yang ada terkait lautan dan mengupayakan pemanfaatan yang sebaik-baiknya. Meskipun dalam pelaksanaannya, mayoritas nelayan menjalankan usaha dalam skala yang kecil, maka hanya mampu untuk menghidupi keluarga sendiri. Hal ini juga yang menjadi penyebab rendahnya kualitas SDM masyarakat pesisir. Menyangkut karakter pemerintah, maka dasar kebijakan yang diterapkan Kabupaten Cilacap dalam pembangunan bidang perikanan berupa pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan hidup. Tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas hidup pengolah ikan dan nelayan, peningkatan serapan tenaga kerja, membuka peluang usaha, peningkatan pendapatan nelayan, petambak, serta masyarakat yang berada di sekitar pesisir lainnya, mengatasi kemiskinan, peningkatan konsumsi ikan, pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, serta peningkatan ketahanan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2017). Pembelajaran Dalam Perspektif Kreativitas Guru Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran. *Lantanida Journal*, 4(1), 35. <https://doi.org/10.22373/lj.v4i1.1866>
- Adriyanto, A., Mulyadi, H., & Ansori, A. (2017). Peran Pangkalan TNI AL Cilacap Dalam Pembinaan Potensi Maritim Guna Menghadapi Imigran Gelap. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 3(3).
- Antony, A.B. (2022). Emerging Significance and Challenges of Maritime Industry. *Journal of Research & Development: A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal*, 13(4), 93-96.
- Arif, W., & Yanto, A. (2022). Konsep Makna Keamanan Maritim. *Jurnal Maritim Indonesia*, 10(3), 227-234.
- Bueger, C. (2015). What is maritime security?. *Marine Policy*, 53(1), 159-164.
- Bueger, C., & Edmunds, T. (2017). Beyond seablindness: a new agenda for maritime security studies. *International Affairs*, 93(6), 1293-1311.
- Cahyandi, K. (2017). Pengaruh Potensi Sektor Kemaritiman Dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Pada Subsektor Kemaritiman Bagi Peningkatan Perekonomian Daerah Di Kabupaten Cilacap. *Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, 2(1), 45-57.
- Cahyandi, K., & Rayendra, A. (2018). Peranan Organisasi Nelayan Dalam Wadah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (Hnsi) Cabang Cilacap Terhadap Peningkatan

- Kesejahteraan Nelayan Di Kabupaten Cilacap. *Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, 2(2), 40-47.
- Febriansyah, I., D.S, A. A., & Helmi, M. (2012). KAJIAN KERENTANAN PANTAI DI PESISIR KABUPATEN CILACAP, JAWA TENGAH. *Journal of Oceanography*, 1(2), 139-148. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/joce/article/view/4153>
- Haras, Y.M. (2017). Peran TNI AL dalam Mendukung Terwujudnya Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Perspektif Manajemen Pertahanan. *Jurnal Prodi Manajemen Pertahanan*, 3(2), 1-14.
- Hendrawan, A. (2020). Potensi Daerah dan Daya Saing Daerah Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen. *Jurnal Litbang Sukowati*, 4(1), 75-90.
- Hermawan, T., & Sutanto, R. (2022). Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Analisa Ancaman dan Kekuatan Laut. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 363-371.
- Indriyani, Y., Laksmono, R., Syhataria, M.I., & Uksan, A. (2022). Strategi Pertahanan Negara dalam Melindungi Sumber Energi di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Blok Ambalat & Kepulauan Natuna. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 16(1), 29-42.
- Marsetio, D. (2014). *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Marsetio. (2013). Strategi TNI Angkatan Laut dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis. *Jurnal Sejarah CITRA LEKHA*, 17(1), 1-18.
- Maulani, E., Handoyo, G., & Helmi, M. (2012). Kajian Potensi Energi Pasang Surut Di Perairan Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah. *Journal of Oceanography*, 1(1), 78-86.
- Melamba, B. (2011). *Kota Pelabuhan Kolaka Di Teluk Bone, 1906-1942*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Nugraha, M.H.R., & Sudirman, A. (2016). Maritime Diplomacy sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 175-182.
- Porlida, E., & Kafaridis, S. (2016). Maritime Industry: The Impact of Freight & Crude Oil Rates on the stock Performance of Shipping Companies. Tesis School of Economics, Business Administration & Legal Studies, International Hellenic University.
- Pratomo, A. (2014). Analisis Potensi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Cilacap. *Economics Development Analysis Journal*, 3(1), 13-27.
- Putri, G.R. (2019). *Analisis Potensi Ekonomi dan Strategi Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2018*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Sibagariang, O.P, Fauziah, & Aguatriani, F. (2011). Analisis Potensi Lestari Sumber daya Perikanan Tuna Longline di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. *Maspuri Journal*, 3(1), 24-29.
- Simanjuntak, A. E., Imron, M., & Baskoro, M. S. (2019). *Strategi Pengembangan Perikanan Cumi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap*. ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut, 3(2), 179-191.
- Taufiqurrahman. (2012). *Sejarah Pelabuhan Bima*. Yogyakarta: Ombak.
- Till, G. (2018). *Seapower : A Guide for the Twenty-First Century*. Cass Series: Naval Policy and History (4.th ed.). Milton: Routledge.
- Zuhdi, S. (2012). *Runtuhnya Pelabuhan Cilacap pada Tahun 1880-1942*. Yogyakarta: KPG.